Peran Birokrasi Dalam Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Luar Negeri

Oleh:

Faisal Rani

Abstract

The goal of this observation is to discuss the problem of bureaucrat's role in protecting immigrant labor that is sent to the foreign country. The problem of Immigrant labor becomes unsolved problem. This problem becomes the attention of all sides from pre-departure, departure until arrival in the country where they work. Bureaucrat through the place of bureaucracy has important role in solving this problem. In this writing, the writer wants to suggest the idea about the role of bureaucracy for protecting Immigrant labor in the foreign country.

Key word: Bureaucracy, Immigrant labor, Foreign Policy

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendiskusikan peran birokrasi dalam melindungi Tenaga Kerja Indonesia yang dikirim ke luar negeri. Masalah Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri menghadapi masalah yang tidak terselesaikan sampai saat ini. Hal ini menjadi perhatian semua kalangan dari sebelum keberangkatan, keberangkatan sampai kedatangan di negara dimana mereka bekerja. Birokrat melalui sistem birokrasi mempunyai peran penting dalam menyelesaikan masalah ini. Dalam tulisan ini, penulis ingin menuangkan ide mengenai peran birokrasi dalam melindungi Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri.

Kata kunci: Birokrasi, Tenaga kerja luar negeri, Kebijakan luar negeri

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara berkembang yang tentu saja mempunyai begitu banyak permasalahan. Mulai dari bidang pendidikan sampai masalah kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat merupakan masalah utama dan penting untuk diselesaikan. Tingkat kemiskinan masyarakat suatu negara dapat dilihat dari banyaknya jumlah pengangguran yang ada. Hal ini disebabkan dengan adanya pengangguran, produktivitas dan pendapatan masyarakat akan berkurang sehingga dapat menyebabkan timbulnya kemiskinan.

Pada umumnya, minat tenaga kerja Indonesia untuk bekerja di luar negeri dipengaruhi oleh faktor-faktor dalam negeri sendiri, seperti faktor pertumbuhan ekonomi yang meningkat, lapangan kerja yang sangat terbatas, sumber pendapatan yang tidak memadai dan faktor pengambilan tenaga kerja yang belum tersalurkan seluruhnya. Sedangkan faktor dari luar negeri adalah mencari pengalaman yang motif utamanya untuk mendapatkan upah yang lebih baik

sehingga dapat mensejahterakan keluarganya.¹ Tetapi tidak jarang kenyataan ini disalah gunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Pemerintah Indonesia telah sekitar 22 tahun (sejak 1985) menyelenggarakan pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri. Hal serupa telah dijalankan kalangan swasta sejak sekitar tahun 1978. Sumbangan devisa dari TKI tersebut dari tahun ke tahun terus meningkat. Misalnya tahun 2001 dengan jumlah sekitar 338.992 TKI terkirim, devisa yang dihasilkan sekitar 537 juta dolar AS (sekitar Rp 5 triliun) dan tahun 2004 terkirim 886.457 TKI yang menghasilkan devisa sekitar 683 juta dolar AS (sekitar Rp 6,3 triliun) (Depnakertrans, 1984). Dengan begitu para TKI tersebut sering dijuluki sebagai 'pahlawan devisa. Bahkan di beberapa kabupaten di Jawa Timur, kontribusi TKI per tahun lebih besar dari APBD-nya. Namun sayangnya cukup banyak terjadi para TKI yang bekerja di luar negeri atau bahkan sebelum ditempatkan di luar negeri mengalami musibah. Musibah itu bisa berupa penipuan oleh calo, pemerasan, juga penganiayaan oleh majikan. Diperkirakan, TKI yang bermasalah di tempat kerja di luar negeri tersebut sekitar 10 persen dari keseluruhan yang umumnya merupakan TKI ilegal. Juga sering diungkapkan oleh para pengamat bahwa sebagian TKI yang bermasalah tak terlindungi oleh Pemerintah. Sistem perlindungan yang lemah tersebut bisa terlihat dari mulai rekrutmen, pelatihan, pengiriman, penempatan, hingga pemulangan. Semua titik yang dilalui dari mulai direkrut hingga kerja dan pulang, selalu ada kasus kekerasan terhadap TKI.

Secara umum masalah TKI muncul karena kurangnya perlindungan dan kurangnya fasilitas pelayanan. Kurangnya fasilitas pelayanan itu bisa berupa minimnya sarana pengiriman uang dari negara tempat kerja ke daerah-daerahnya di Tanah Air. Sementara itu, kalau dibandingkan dengan tenaga kerja Filipina, fasilitas dari pemerintahnya sudah sangat maju. Sehingga kontribusi dan kesejahteraan TK Filipina jauh lebih baik dibandingkan TKI. Sebut saja, kontribusi devisa seluruh TK Filipina terhadap negaranya yakni sekitar 12 milyar dolar AS (sekitar Rp 110, 4 trilyun) atau 17,5 kali kontribusi TKI.

Realita yang ada di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak TKI yang tidak mendapatkan pelayanan dan perlindungan yang memadai dari pemerintah Indonesia maupun dari negara tempat ia bekerja. Dari sisi perekrutan saja misalnya, pemerintah belum bisa mengatasi keberadaan perusahaan pengirim tenaga kerja yang illegal atau pun memberantas jaringan

¹ Iskandar Budiman, *Dilema Buruh Di Rantau (Membongkar system kerja TKI di Malaysia)*, Ar-Ruzz, Yogyakarta, 2004, hlm. 381.

trafficker yang merekrut anak-anak di bawah umur. Selain itu, kasus-kasus yang menimpa TKI di tempat kerjanya pun banyak yang tidak ditanggapi secara cepat dan tepat oleh negara. Kasus terlanturnya 400 buruh migran Indonesia di kolong jembatan di kota Jeddah pada bulan Agustus 2009 misalnya menunjukkan ketidaksiapan pemerintah dalam merespon permasalahan yang dihadapi oleh TKI di tempat mereka bekerja. Terlanturnya warga negara Indonesia di Jeddah tersebut bahkan memakan korban jiwa. Seorang tenaga kerja wanita (TKW) bernama Halimah bt Kohar bahkan meninggal dunia setelah dua minggu menderita sakit dan tidak mendapatkan perawatan medis.²

Melihat sekelumit potret TKI di atas maka sungguh suatu hal yang ironis apabila TKI yang dielu-elukan sebagai pahlawan devisa negara, yang pada tahun 2008 berhasil membawa pemasukan bagi negara sebesar Rp 82 triliun³, masih mengalami hambatan-hambatan didalam memperoleh hak-hak dasarnya sebagai pekerja ataupun sebagai manusia.

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk sangat banyak di dunia. Sensus tahun 2010 mencatat 237,4 juta jiwa dan Indonesia tergolong dalam Negara yang berkembang. Salah satu dari ciri negara berkembang adalah standar hidup dan produktifitas penduduknya yang rendah, Pertumbuhan penduduk yang besar namun kurang tersedianya lapangan perkerjaan.⁴ Kurangnya jumlah lapangan pekerjaan seiring dengan kemampuan keterampilan dan produktifitas dari penduduk yang rendah menyebabkan meningkatnya angka pengangguran. Kondisi ini menjadi delematis bagi bangsa Indonesia.

Sehingga ada sebagian dari penduduk Indonesia yang berkeinginan untuk mengadu nasib tidak di negeri sendiri. Iming-iming berkerja di luar negeri dengan berpenghasilan lebih tinggi dibandingkan dengan pendapat dalam negeri. Dengan penuh harapan dapat meningkatkan kesejahteraan secara ekonomi mereka berkerja sebagai tenaga kerja Indonesia (TKI). Ada beberapa negara menjadi tujuan utama TKI adalah Saudi Arabia, Malaysia, Singapura, Hongkong, Korea Selatan, Taiwan, dan Jepang,⁵ dengan bidang pekerjan yang umumnya buruh

² Migrant Care, "Ratusan Buruh Migran Indonesia Terlanturnya di Bawah Kolong Jembatan di Jeddah", Press Release Migrant Care 6 Agustus 2009, <<http://www.migrantcare.net/mod.php?mod=publisher&op=viewarticle&cid=6&artid=628>>, diakses 8 Januari 2010

³ Hamzirwan, "TKI, Urat Nadi yang Diabaikan", Kompas 30 Desember 2009, <<http://cetak.kompas.com/read/xml/2009/12/30/03434869/tki.urat.nadi.yang.diabaikan>>, diakses 8 Januari 2010.

⁴ Bachrawi Sanusi, 2004 "Pengantar Ekonomi Pembangunan" Penerbit Rineka Cipta hal : 16

⁵ M.Sadli, "Masalah Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia", dalam <http://www.kolom/pasific.net.id/modules.phd>, diakses 30 September 2010, pukul 10.00 WIB

pabrik, buruh perkebunan atau pembantu rumah tangga dan sangat sedikit yang bekerja sebagai peneliti. Dalam konteks internasional, Indonesia merupakan salah satu negara pengirim tenaga kerja migran terbesar di Asia.⁶

Untuk berangkat keluar negeri ada yang menggunakan jalur resmi dan jalur tidak resmi. Jalur tidak resmi menjadi pilihan biasanya dengan pertimbangan, gaji yang tinggi dan akan kemudahan-kemudahan prosesnya. Melalui jalur ini tidak jarang banyak dari Para TKI yang tertipu dengan cara yang demikian. Dan jalur resmi yang disediakan pemerintah, yaitu melalui agen rekrutmen yang secara resmi ditunjuk oleh pemerintah yang disebut dengan Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI), dan kini dikenal dengan sebutan Pelaksana Penempatan Jasa Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS)⁷. Terdapat tiga asosiasi yang bergerak dalam bidang ini, yaitu Himpunan Pengusaha TKI (Himsataki), Asosiasi Perusahaan Jasa TKI (Apjati), dan Indonesian Development Employee Agencies (IDEA).

Pada Tempat mereka berkerja banyak dari mereka yang gajinya tidak dibayarkan, ada yang disiksa majikan, ada yang mengalami pemerkosaan. Beberapa kasus yang dapat cermati antara lain. Sumiati binti Salan Mustapa wanita asal Nusa Tenggara Barat. Sumiati menjadi TKI di Arab Saudi dan mengalami penganiayaan oleh majikannya. Bibir Sumiat digunting majikan hingga harus menjalani perawatan dirumah sakit King Fahd di Madinah kamar nomor 125 bangsal 1B Rumah Sakit, Arab Saudi⁸.

Migrant care telah mencatat sekitar 45.845 kasus yang menimpa buruh migrant Indonesia di luar negeri yang dapat di kelompokkan ke dalam jenis diantaranya :

- a. Meninggal dunia ada 908 kasus
- b. PHK sepihak dan tidak digaji ada 8.080 kasus
- c. Deportasi dari Malaysia ada 22.745 kasus
- d. Penganiayaan ada 1.187 kasus
- e. Pelecehan seksual ada 874 kasus

⁶ : Suko Bandiyono dan Fadji Alihar “ *A review of Research Work on International Migration in Indonesia*., dalam <http://www.unesco.org/most/apmrlabo5.doc>, di akses 29 September 2010, pukul 21.30 WIB.

⁷ Istilah PPTKIS mulai dikenal sejak tahun 2004. Dalam UU 39 Tahun 2004, istilah PJTKI diganti dengan istilah PPTKIS.

⁸ Duka di negeri Gurun, <http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/2010/11/29/NAS/mbm>. diakses 20 September 2011 pukul 10.00 WIB

Pemerintah seharusnya menaruh perhatian pada TKI yang bererja di luar negeri. Dalam Undang-Undang bahwa setiap warga Negara harus mendapatkan perlindungan dari Negara. Namun tidak bagi sebagian TKI pada hal TKI telah menyumbang devisa yang besar bagi Negara 60 Triliun tahun 2010. Pada tulisan ini penulis ingin menjawab bagaimana peran birokrasi mewakili pemerintah Indonesia dalam melindungi TKI diluar negeri?

Teori Peran (Role Theory)

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan Teori Peran melalui perspektif pluralis dan tingkat analisa kelompok. Tingkat analisisnya Kelompok yang dikemukakan oleh Mohtar Mas'oed, yang berasumsi bahwa individu umumnya melakukan tindakan internasional dalam kelompok. Hubungan internasional sebetulnya adalah hubungan antar berbagai kelompok kecil di berbagai negara. Artinya, peristiwa internasional sebenarnya ditentukan bukan hanya oleh individu, tetapi oleh kelompok kecil (seperti kabinet, dewan penasehat keamanan, politbiro, dan sebagainya) dan oleh organisasi, birokrasi, departemen, badan-badan pemerintahan, dan sebagainya. Dengan demikian, untuk memahami hubungan internasional terlebih dahulu harus mempelajari perilaku kelompok-kelompok kecil dan organisasi-organisasi yang terlibat dalam hubungan internasional. Perspektif yang digunakan oleh penulis adalah *pluralist perspective*. Diana L. Eck menjelaskan bahwa pluralisme adalah suatu sistematika serta kerangka di mana terdapat beberapa kelompok atau bagian dari sistem lainnya dan saling berhubungan dengan basis saling menghargai dan menghormati antar sesama.⁹ Dalam pluralisme, aktor non negara adalah aktor penting dalam bahasan hubungan internasional. Ada empat aspek penting dalam perspektif pluralisme¹⁰, yaitu:

1. Aktor non-negara adalah salah satu unsur penting dalam dunia politik. Organisasi Internasional adalah salah satu contoh aktor politik non-negara.

⁹ Diana L. Eck, *What is pluralism*, diakses dari http://pluralism.org/pages/pluralism/what_is_pluralism pada 7 Maret 2011.

¹⁰ Paul R. Viotti, Mark V. Kauppi, *International Relations Theory: Realism, Pluralism, and Beyond*. (Boston: Allyn and Bacon, 1998), hal.192.

2. Kaum pluralis beranggapan bahwa negara bukanlah aktor yang berdiri sendiri. Negara dalam hal ini terdiri dari individu (rakyat), kelompok kepentingan, dan birokrat lainnya.
3. Pluralis juga bertentangan dengan kaum realis yang mengatakan bahwa negara adalah aktor rasional. Dalam situasi pembuatan keputusan, aktor politik dalam hal ini cenderung pada untuk saling berkompromi, tergabung dalam suatu forum atau kelompok lainnya, menggunakan posisi tawar (*bargaining position*), dan mengedepankan kepentingan nasionalnya.
4. Agenda internasional bagi kaum pluralis cenderung bersifat ekstensif. Pluralis tidak hanya membahas masalah keamanan nasional secara fisik, tetapi juga melalui aspek ekonomi, sosial, lingkungan dan budaya.

Birokrasi merupakan salah-satu institusi yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kegiatan. Keberadaan birokrasi tidak hanya dalam struktur pemerintah, tetapi juga ada dalam organisasi-organisasi swasta, institusi pendidikan dan sebagainya. Bahkan dalam kasus-kasus tertentu birokrasi diciptakan hanya untuk menjalankan suatu kebijakan tertentu.

Ripley dan Franklin dalam Winarno¹¹ mengidentifikasi enam karakteristik birokrasi sebagai hasil pengamatan terhadap birokrasi di Amerika Serikat, yaitu:

1. Birokrasi diciptakan sebagai instrumen dalam menangani keperluan-keperluan publik (*public affair*).
2. Birokrasi merupakan institusi yang dominan dalam implementasi kebijakan publik yang mempunyai kepentingan yang berbeda-beda dalam setiap hierarkinya.
3. Birokrasi mempunyai sejumlah tujuan yang berbeda.
4. Fungsi birokrasi berada dalam lingkungan yang kompleks dan luas.
5. Birokrasi mempunyai naluri bertahan hidup yang tinggi dengan begitu jarang ditemukan birokrasi yang mati.
6. Birokrasi bukan kekuatan yang netral dan tidak dalam kendali penuh dari pihak luar.

Implementasi kebijakan yang bersifat kompleks menuntut adanya kerjasama banyak pihak. Ketika struktur birokrasi tidak kondusif terhadap implementasi suatu kebijakan, maka hal ini akan menyebabkan ketidakefektifan dan menghambat jalannya pelaksanaan kebijakan.

¹¹ Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Med Press. Yogyakarta. 149-160

Berdasarkan penjelasan di atas, maka memahami struktur birokrasi merupakan faktor yang fundamental untuk mengkaji implementasi kebijakan publik.

Menurut Edwards III dalam Winarno¹² terdapat dua karakteristik utama dari birokrasi yakni: "Standard Operational Procedure (SOP) dan fragmentasi". "Standard operational procedure (SOP) merupakan perkembangan dari tuntutan internal akan kepastian waktu, sumber daya serta kebutuhan penyeragaman dalam organisasi kerja yang kompleks dan luas".

Ukuran dasar SOP atau prosedur kerja ini biasa digunakan untuk menanggulangi keadaan-keadaan umum diberbagai sektor publik dan swasta. Dengan menggunakan SOP, para pelaksana dapat mengoptimalkan waktu yang tersedia dan dapat berfungsi untuk menyeragamkan tindakan-tindakan pejabat dalam organisasi yang kompleks dan tersebar luas, sehingga dapat menimbulkan fleksibilitas yang besar dan kesamaan yang besar dalam penerapan peraturan.

Berdasarkan hasil penelitian Edward III yang dirangkum oleh Winarno¹³ menjelaskan bahwa: "SOP sangat mungkin dapat menjadi kendala bagi implementasi kebijakan baru yang membutuhkan cara-cara kerja baru atau tipe-tipe personil baru untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan. Dengan begitu, semakin besar kebijakan membutuhkan perubahan dalam cara-cara yang lazim dalam suatu organisasi, semakin besar pula probabilitas SOP menghambat implementasi".

Namun demikian, di samping menghambat implementasi kebijakan SOP juga mempunyai manfaat. Organisasi-organisasi dengan prosedur-prosedur perencanaan yang luwes dan kontrol yang besar atas program yang bersifat fleksibel mungkin lebih dapat menyesuaikan tanggung jawab yang baru daripada birokrasi-birokrasi tanpa mempunyai ciri-ciri seperti ini.

Sifat kedua dari struktur birokrasi yang berpengaruh dalam pelaksanaan kebijakan adalah fragmentasi. Edward III dalam Winarno¹⁴ menjelaskan bahwa "fragmentasi merupakan penyebaran tanggung jawab suatu kebijakan kepada beberapa badan yang berbeda sehingga memerlukan koordinasi". Pada umumnya, semakin besar koordinasi yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan, semakin berkurang kemungkinan keberhasilan program atau kebijakan.

¹² Ibid..

¹³ Ibid..

¹⁴ Ibid..

Dapat disimpulkan fragmentasi mengakibatkan pandangan-pandangan yang sempit dari banyak lembaga birokrasi. Hal ini akan menimbulkan konsekuensi pokok yang merugikan bagi keberhasilan implementasi kebijakan.

Berikut hambatan-hambatan yang terjadi dalam fregmentasi birokrasi berhubungan dengan implementasi kebijakan publik menurut Winarno¹⁵, Pertama, tidak ada otoritas yang kuat dalam implementasi kebijakan karena terpecahnya fungsi-fungsi tertentu ke dalam lembaga atau badan yang berbeda-beda. Di samping itu, masing-masing badan mempunyai yurisdiksi yang terbatas atas suatu bidang, maka tugas-tugas yang penting mungkin akan terlantarkan dalam berbagai agenda birokrasi yang menumpuk”.”Kedua, pandangan yang sempit dari badan yang mungkin juga akan menghambat perubahan. Jika suatu badan mempunyai fleksibilitas yang rendah dalam misi-misinya, maka badan itu akan berusaha mempertahankan esensinya dan besar kemungkinan akan menentang kebijakan-kebijakan baru yang membutuhkan perubahan”.

Birokrasi merupakan organisasi pemerintahan yang terdiri dari sub-sub struktur yang memiliki hubungan satu dengan yang lain. Birokrasi memiliki fungsi, peran dan kewenangan dalam mencapai visi dan misi dari tujuan yang telah ditetapkan. Setidaknya dalam hal ini birokrasi memiliki tiga tugas pokok antara lain memberikan pelayanan, pemberdayaan dan menyelenggarakan pembangunan.

Pelayanan pada sisi administrasi birokrasi mempunyai peranan penting dalam menjalankan dan mewakili negara dalam menjalankan fungsinya. Negara punya kewajiban untuk melindungi warganya dimanapun warganya tersebut berada baik itu dari segi hukum maupun dari sisi keamanan bagi warganya.

Pembahasan

Peran Birokrasi dan Perlindungan TKI di Luar Negeri

Kurangnya jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia menyebabkan sebagian besar masyarakat di Indonesia memilih untuk bekerja sebagai TKI di negara lain khususnya Arab Saudi. Arab Saudi menjadi pilihan TKI sebagai negara tujuan dikarenakan negara tersebut memiliki kerja ekonomi yang kuat sehingga negara ini menduduki urutan ke-3 dalam hal kestabilan ekonomi secara menyeluruh. Minyak bumi merupakan penghasilan utama negara

¹⁵ Ibid..

tersebut. Produksi minyak 9 juta barel per hari, pada akhir 2004 Arab Saudi mencatat pendapatan sebesar \$ 754.4 miliar (US \$ 201.1 miliar).¹⁶ Jumlah pendapatan negara yang sangat besar, tahun 2005 sebanyak 626.895 orang telah tercatat sebagai TKI di Arab Saudi dan pada tahun 2006 mengalami peningkatan sebesar 4,25%.¹⁷ Arab Saudi merupakan negara terbesar kedua pengiriman TKI setelah Malaysia, sisanya berada dinegara lain seperti Uni Emirat Arab (UEA), Kuwait, Yordan Hongkong dan Taiwan.¹⁸

Kebijakan penempatan TKI di luar negeri diarahkan untuk memanfaatkan peluang kerja di luar negeri dengan mengedepankan aspek perlindungan terhadap harkat dan martabat serta keselamatan dan kesehatan TKI sejak di daerah asal, selama di negara tujuan sampai kembali ke daerah asal. Untuk itu, strategi yang telah dan akan dilakukan oleh Pemerintah dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian, yakni:

- *Regulasi*, dilakukan dengan menerbitkan Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri dan menyusun berbagai peraturan pelaksanaannya.

- *Kelembagaan*, dilakukan dengan membagi kewenangan pusat dan daerah secara jelas di dalam sistem penempatan dan perlindungan TKI.

- *Tindakan*, dilakukan dalam berbagai bentuk, antara lain:

1 Melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 06 tahun 2006 tentang Reformasi Kebijakan Sistem Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri, dengan cara:

a. Penyederhanaan birokrasi pelayanan penempatan TKI seperti penyederhanaan prosedur penempatan yang semula 24 simpul menjadi 14 simpul.

b. Meringankan beban biaya yang ditanggung oleh CTKI dengan membebaskan biaya Fiskal, tidak menaikkan biaya Paspor, membebaskan biaya pengurusan Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN), membebaskan biaya PAP

2 Meningkatkan kualitas TKI melalui pelatihan keterampilan, kemampuan, bahasa dan persiapan mental. Hanya akan menempatkan TKI yang dinilai sudah memenuhi syarat

¹⁶ http://www.kbri-riyadh.org/artikel/menggali_potensi_profit-sharing_rejeki_minyak_Arab_Saudi_Riyadh/ Artikel Menggali Potensi Rejeki Minyak Arab Saudi, Riyadh. diakses tgl 19 November 2009 pukul 20.10 wib

¹⁷ <http://www.kbri-riyadh.org>, Loc. Cit

¹⁸ <http://www.antara-sumbar.com/id/index.php?sumbar=artikel&id=312/> Artikel Catatan Akhir Tahun Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia. Diakses tgl 15 februari 2010 pukul 23.45 wib

kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat dari Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang ditunjuk oleh Depnakertrans.

- 3 Memberikan perlindungan terhadap hak dan harta TKI melalui program asuransi TKI yang dilaksanakan oleh lima Konsorsium Asuransi. Dalam hal ini, Konsorsium Asuransi tersebut juga diwajibkan untuk bekerjasama dengan lembaga bantuan hukum/lawyer di negara penempatan TKI.
- 4 Meningkatkan hubungan bilateral dengan delapan negara penempatan yaitu Malaysia, Korea Selatan, Jordania, Kuwait, Taiwan, Australia dan Uni Emirat Arab dalam bentuk penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU). Saat ini dipersiapkan penandatanganan MoU dengan enam negara, yaitu: Qatar, Yunani, Kuwait dan Yordan (revisi), Jepang, Brunei Darussalam serta Maroko.
- 5 Membentuk empat sentra layanan penempatan dan perlindungan TKI (SP3TKI) di Serang, Denpasar, Riau, dan Kuala Tungkal.
- 6 Membentuk Atase Ketenagakerjaan di lima negara, di luar negara-negara yang telah memiliki Atase Ketenagakerjaan, yaitu Singapura, Brunai Darussalam, Korea Selatan, Qatar dan Yordania.
- 7 Melakukan penandatanganan kesepakatan bersama dengan pihak Kepolisian Negara R.I dalam rangka penegakan hukum.
- 8 Berpartisipasi aktif dalam forum International yang diharapkan dapat meningkatkan perlindungan bagi TKI, seperti ILC, sidang IOM, pertemuan UNIFEM, dan pertemuan CEDAW.
- 9 Melakukan registrasi dan penerbitan SIPPTKIS, dimana sampai saat ini telah terdaftar 496 PPTKIS.
- 10 Turut melaksanakan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, khususnya yang menyangkut TKI sebagaimana diamanatkan di dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang melalui pencegahan (tindak pidana) dan penanganan (korban), dengan cara:
 - a. Peningkatan kewaspadaan masyarakat mengenai ciri dan modus operandi tindak pidana perdagangan orang.
 - b. Pelatihan anti perdagangan orang.
 - c. Penelitian.

d. Perluasan kesempatan kerja.

e. Perlindungan korban.

f. Pembentukan gugus tugas.

1. Membina dan pemberdayaan TKI purna agar dapat memanfaatkan penghasilannya menjadi usaha ekonomi produktif dengan memberikan bimbingan wirausaha, pengembangan usaha, pendampingan, membangun akses untuk memperoleh kredit modal Perbankan. Mendorong terbentuknya Asosiasi TKI purna yang dimaksudkan sebagai wadah integrasi dan konsultasi TKI Purna dalam meningkatkan dan mengembangkan potensi dan usaha yang mereka miliki.¹⁹

2. Melindungi TKI merupakan wujud dari pelayanan yang diberikan oleh negara terhadap warga negaranya. TKI membutuhkan birokrasi dalam mendapatkan perlindungan. Keputusan MENPAN No.63 Tahun 2004 mengelompokkan tiga jenis pelayanan dari instansi pemerintah serta BUMN/BUMD. Pengelompokan pelayanan tersebut dikelompokkan dalam tiga kategori antara lain :

A. Jenis Pelayanan Administrative

Pelayanan dalam bentuk administrative merupakan pelayanan yang diberikan dalam bentuk dokumentasi seperti pengurusan surat izin, sertifikat, ijin-ijin dan keterangan lainnya. Jenis pelayanan ini sangat dibutuhkan oleh TKI dalam mengadu nasib di negeri orang. Pemilikan paspor, pemilikan visa dan surat-surat lainnya sehingga menjadi pegangan sah tentang identitas mereka dan berkekuatan hukum. Kelengkapan dokumen-dokumen yang dibutuhkan oleh TKI akan memberikan perlindungan kepada TKI dalam menghadapi persoalan-persolan hkum di negara tempat meek berkerja.

Para birokrat hendaknya memberikan kemudahan dan sosialisasi berkesenambungan tentang persoalan izin. Dan birokrasi juga diharapkan agar mengawal perusahaan-perusahaan

¹⁹ Carunia Mulya Firdausy, *International labour migration From Indonesia; Trends, Consequences and Issues, dalam Asia Pasific Development Journal*, Vol. 4 no. 1, juni 1997.

yang menjalankan bidang usahanya dalam pengiriman jasa TKI. Bagi perusahaan-perusahaan yang melanggar dan tidak mematuhi aturan maka lakukan penindakan tegas secara hukum yang berlaku.

Secara administratif pelaksana dan prosedur Penempatan Tenaga Kerja ke Luar Negeri dalam Undang-Undang No.39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri tercantum pada pasal 10 menetapkan bahwa pelaksana penempatan TKI di luar negeri yakni :

1. Pengurusan Surat Izin Pengerahan
2. Perekrutan dan seleksi
3. Pendidikan dan pelatihan kerja
4. Pemeriksaan kesehatan dan psikologi
5. Pengurusan dokumen
6. Uji kompetensi
7. Pembekalan akhir pemberangkatan
8. Pemberangkatan.

Sedangkan pihak-pihak yang terkait dalam penempatan TKI ke luar negeri antara lain:

1. Calon Tenaga Kerja Indonesia atau disebut calon TKI. TKI merupakan setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja diluar negeri dan terdaftar di instansi Pemerintahan Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.
2. Perusahaan dan pelaksana penempatan TKI swasta, adalah badan hukum yang memperoleh izin tertulis dari pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan TKI di luar negeri.
3. Mitra usaha, adalah instansi atau badan usaha berbentuk badan hukum di negara tujuan yang bertanggung jawab dalam penempatan TKI pada pengguna.
4. Pengguna jasa TKI, adalah instansi Pemerintah, Badan Hukum Pemerintah, Badan Hukum Swasta, dan/atau Perseorangan di negara tujuan yang mempekerjakan TKI.

Undang-undang ini menjadi dasar bagi birokrat dalam melindungi TKI dari praktek percaloan dan tindakan-tindakan perusahaan yang tidak sesuai dengan aturan, Seperti : pertama penampungan-penampungan liar yang jauh dari kelayakan sehingga mengakibatkan rawan

timbulnya penyakit. Kedua rentag waktu yang cukup lama menunggu pemberangkatan oleh para calo. Ketiga penipuan dan pemerasan yang dialami oleh TKI.²⁰ Keempat tidak perlindungan hukum bagi TKI.

B. Jenis Pelayanan Barang

Sedangkan pelayanan barang merupakan bentuk kegiatan pelayanan yang diberikan dengan hasil akhirnya berupa barang. Misalnya tempat penampungan bagi TKI di luar negeri.

C. Jenis Pelayanan Jasa

Jenis pelayanan jasa maksudnya bentuk pelayanan yang diberikan dengan mendapatkan manfaat bagi penggunaannya secara langsung dan habis terpakai dalam jangka waktu tertentu, misalnya seperti pelayanan dalam bentuk perlindungan hukum, dan lainnya.

Perlindungan terhadap TKI ini seharusnya dilakukan oleh birokrasi (pemerintah) secara menyeluruh. Mulai dari perlindungan pemberdayaan TKI, prapenempatan TKI, selama masa kerja TKI, sampai dengan sudah penempatan. Jenis perlindungan TKI berupa pencegahan kemungkinan terjadinya masalah yang menimpa TKI dengan pembuatan regulasi, sosialisasi program, penggunaan, penetapan standar kualifikasi TKI/PJTKI, pengawasan terhadap regulasi, serta pemberdayaan calon TKI. Memberikan bantuan penyelesaian terhadap pemenuhan hak-hak TKI baik secara harkat maupun secara psikis. Kemudian dengan memberikan perlindungan penindakan bagi pelanggaran ketentuan yang merugikan TKI.

Perlindungan ini perlu menjadi perhatian para birokrat. Beberapa faktor yang menyebabkan tidak terpenuhi dan lemahnya pengelolaan TKI antara lain: lemahnya pelayanan dan belum sinerginya kinerja antar instansi birokrasi dalam melindungi TKI, kurangnya pelatihan yang diberikan pemerintah pada TKI dalam meningkatkan daya saing TKI di luar negeri, banyaknya terjadi Kolusi Korupsi dan Nepotisme (KKN) dalam pengurusan TKI serta belum adanya jaminan keamanan bagi TKI di tempat mereka berkerja.

Membentuk Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI)

Adanya kasus-kasus yang dialami oleh para tenaga kerja Indonesia memperlihatkan betapa lemahnya posisi dan perlindungan terhadap TKI diluar negeri. Padahal dalam pembukaan UUD 1945 dijelaskan bahwa negara berkewajiban melindungi setiap warga negaranya termasuk

²⁰ Syafri Harto, 2003, "*Masalah Tki Illegal*, (Studi Tentang Riau Sebagai Daerah Transit Bagi TKI Illegal)" Jurnal Ilmu Hubungan Internasional hal 177

TKI diluar negeri. Sering kali proses perlindungan bagi TKI belum optimal bahkan terkesan mengabaikan kewajiban dan tanggung jawab institusional tersebut. Sesuai dengan UU No. 39 tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia, maka perlu membentuk Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) sebagai lembaga pemerintah untuk dilaksanakan kebijakan dibidang penempatan dan perlindungan TKI secara terkoordinasi dan terintegrasi.

BNP2TKI adalah lembaga pemerintah yang diharapkan mampu memfasilitasi segala kebutuhan para tenaga kerja Indonesia. Semakin banyak peristwa yang dialami oleh para TKI sudah tentu dibutuhkan suatu tempat atau wadah yang dapat menerima segala keluhan yang dialami oleh para TKI. Tidak hanya menjadi tempat pengaduan, BNP2TKI juga harus mampu membantu dan melindungi hak-hak para TKI yang terenggut sehingga dapat menjamin hak-hak dan martabat para tenaga kerja. Berdasarkan hal tersebut, pada tanggal 8 September 2006 di Jakarta, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menetapkan peraturan presiden No. 81 tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI).²¹

Berdasarkan definisinya, perlindungan TKI menurut UU No. 39 tahun 2004 adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan TKI dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak-hak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, baik sebelum, selama maupun sesudah bekerja. Sedangkan berkaitan dengan tugas perlindungan TKI yang khusus ditugaskan kepada BNP2TKI. Sebagaimana disebutkan dalam Perpres No. 81 tahun 2006 adalah mempunyai tugas merumuskan, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis perlindungan TKI yang meliputi standarisasi, sosialisasi dan pelaksanaan perlindungan mulai dari pra-pemberangkatan, selama penempatan serta sampai dengan pemulangan.²²

Adapun peranan BNP2TKI dalam melindungi para TKI sebelum keberangkatan adalah dengan memberikan pembekalan-pembekalan terhadap calon TKI terkait bidang pekerjaan yang akan dijalani di negara penempatan. Yakni dengan melakukan pelatihan selaman 320 jam melalui Kelompok Berlatih Berbasis Masyarakat (KBBM). Semua ini tidak dipungut biaya alias gratis. Peranan BNP2TKI pada saat penempatan dinegara tujuan adalah dengan melakukan

²¹ <http://www.bn timer2tki.go.id/content/view/188/205/> *Artikel Peraturan Presiden Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia*. diakses tgl 5 April 2010 pukul 14.15 wib

²² <http://www.bn timer2tki.go.id>. Loc. Cit

kerjasama dengan pejabat atau petugas perwakilan negara Republik Indonesia di negara tempat TKI bekerja.²³

Sesuai dengan pasal 23 Perpres No. 81 tahun 2006, guna memperlancar pelaksanaan penempatan dan perlindungan TKI maka dibentuk Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI (BP3TKI) di ibukota propinsi. Badan ini bertugas untuk memberikan kemudahan dalam pemrosesan seluruh dokumen penempatan, perlindungan dan penyelesaian masalah TKI secara terkoordinir dan terintegrasi diwilayah kerja masing-masing BP3TKI.

Dalam menjalankan tugasnya, BNP2TKI juga bekerjasama dengan instansi-instansi terkait yang saling berkoordinasi. Sebagai contoh perekrutan calon TKI dilayani oleh Disnaker Kab/Kota, KTP dilayani oleh Depdagri, *Check Up* Kesehatan dilayani oleh Depkes, Pasport dilayani oleh Dephum dan Ham, Pengesahan *Job Order* dan pembelaan dilayani oleh Deplu melalui perwakilan RI dinegara-negara tujuan penempatan, angkutan dilayani oleh Dephub, keamanan dilayani oleh POLRI, pelatihan melalui BLKN izinnya dikeluarkan oleh Disnaker Kab/Kota. BNP2TKI mengkoordinasikan pelayanan-pelayanan tersebut melalui penertiban Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN).

Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh BNP2TKI²⁴

- 1) Roadshow BNP2TKI kenegara Singapura, Korea Selatan, Hong Kong, Macao, Uni Emirat Arab, Siria dan Saudi Arabia dalam rangka penguatan perlindungan serta penjajakan peluang kerja TKI formal.
- 2) Peluncuran Sistem Pelayanan Warga (*Citizen Services*) dinegara-negara yang jumlah TKI-nya besar dan belum memiliki Atase atau Staf Teknis Ketenagakerjaan (Mendampingi Mentri Luar Negeri).

²³ http://www.berpolitik.com/static/internal/2007/03/news_2739.html Artikel Peranan BNP2TKI tidak Optimal. Diakses tgl 17 Mei 2010 pukul 20.15 wib

²⁴ <http://www.bnp2tki.go.id>. Loc. Cit

- 3) Menandatangani MoU dengan ILO pada tanggal 30 Mei 2007 dalam rangka mengefektifkan dan memanfaatkan bantuan ILO dibidang *Capacity Building* dan pelatihan bagi staf BNP2TKI.
- 4) Menjajaki jaringan kerjasama dengan berbagai lembaga internasional seperti ASEAN, AANZ (Asean, Australia, New Zealand), GMFD (*Global Forum on Migration and Development*), ACILS (*American Center for International Labor Solidarity*), IOM (*International Organization for Migration*), WTO dan UNIFEM (*United Nations Development Funds for Migration*) sebagai upaya memperkuat posisi tawar Indonesia dalam melindungi TKI dinegara-negara penempatan.
- 5) Menerapkan Surat Izin Pengerahan (SIP) yang memberikan keleluasaan kepada PPTKIS untuk bisa berpindah wilayah rekrut tanpa harus melaporkan kepada BNP2TKI tetapi cukup pengantar dari BP3TKI. Hal ini sebagai langkah awal menuju pemberlakuan SIP secara nasional.
- 6) Memberi penegasan kepada Pelaksana Penempatan TKI Swasta agar melaksanakan UU No. 39 tahun 2004 dimana rekomendasi pembuatan paspor serta penandatanganan perjanjian penempatan dilaksanakan dikantor-kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten/Kota.
- 7) Menghapuskan pungutan Rp. 25.000,- kepada TKI yang pulang melalui Terminal 3 bandara Soekarno Hatta terhitung mulai tanggal 17 Juni 2007.
- 8) Menghentikan pelayanan sementara kepada berbagai agen diluar negeri seperti di Hong Kong, Singapura, Taiwan dan Arab Saudi sebagai upaya penerapan sanksi kepada mitra usaha yang terbukti merugikan TKI sehingga dapat menimbulkan efek jera.

Peningkatan Peran yang sedang dilakukan oleh BNP2TKI

- 1) Meningkatkan kerjasama luar negeri dengan negara-negara tujuan penempatan, diarahkan untuk mempromosikan potensi tenaga kerja professional yang bekerjasama dengan Depnakertrans dan Deplu untuk merealisasikan perundingan dan penandatanganan MoU dengan negara Kuwait, Arab Saudi, Syiria dan Yordania. Mendorong pembentukan *Citizen Services* di negara yang belum mempunyai atase ketenagakerjaan serta

mengoptimalkan peran atase ketenagakerjaan diperwakilan RI diluar negeri sebagai *Market Intelegent*.

- 2) Penggunaan Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN), Implementasi KTLN sudah dimulai sejak tanggal 20 November 2007 yang tersebar di 20 lokasi pelayanan KTKLN. Penggunaan KTKLN akan secara mudah dilakukan pengecekan identitas dan merecord keberangkatan TKI di embarkasi.
- 3) Pelayanan Bursa Kerja luar negeri dalam pelayanan informasi dan fasilitasi kesempatan kerja ke luar negeri di wilayah Kabupaten/Kota/Kecamatan. Bursa Kerja luar negeri bertujuan untuk menghentikan praktek percaloan dalam perekrutan CTKI yang modus digunakan mirip dengan perdagangan manusia. Untuk mendukung upaya peningkatan upah TKI, pemerintag telah melaksanakan Rating BLKN-LN untuk meningkatkan kualitas CTKI/TKI melalui perbaikan sistem pelatihan dan penampungan.
- 4) Permasalahan terbesar dalam bidang Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Calon TKI adalah banyaknya pemalsuan sertifikat hasil pemeriksaan kesehatan sehingga permasalahan ini akan diatasi melalui standarisasi sertifikat hasil pemeriksaan kesehatan yang harus dilaksanakan oleh seluruh sarana kesehatan dan terintegrasi dengan sistem informasi secara *online*.

Peranan BNP2TKI dalam meningkatkan perlindungan terhadap TKI sangatlah besar karena BNP2TKI lah yang bertanggung jawab melindungi para TKI sehingga berbagai upayapun terus dilakukan. Langkah awal yang dilakukan melalui peningkatan kualitas TKI. Hal ini dilakukan pada awal perekrutan TKI dengan cara memperketat proses seleksi kesehatan, proses memperoleh paspor yang harus menggunakan sidik jari (*finger print*) dan fotobiometrik, hingga pemilihan jenis pekerjaan dan lapangan pekerjaan yang dituju TKI. Selain itu, BNP2TKI akan menggunakan diplomasi buruh guna memperjuangkan ratifikasi konvensi *International Labor Organization* (ILO) tentang perlunya perlindungan terhadap tenaga kerja migran.²⁵

Perlindungan terhadap TKI harus terus ditegakkan karena masyarakat dunia bisa saja bangkrut tanpa andil buruh migran, termasuk TKI yang jumlahnya begitu besar. Hal ini tentu

²⁵ <http://www.bnp2tki.go.id/> *Penempatan TKI Skill Akan Terus Ditingkatkan Kualitasnya*/rabu,28 agustus 2008.
Diakses tgl 6 April 2010 pukul 00.25 wib

saja merupakan potensi yang tidak bisa diabaikan. Masyarakat dunia membutuhkan tenaga kerja untuk membantu kehidupan perekonomian.

Kerjasama Pemerintah dengan Lembaga Non Pemerintah

Meskipun pemerintah Indonesia telah memberikan perlindungan bagi TKI, namun perlindungan tersebut masih memiliki kekurangan. Peraturan perundang-undangan yang ada belum sepenuhnya mampu melindungi hak-hak TKI di luar negeri. Peraturan perundang-undangan yang kurang memadai membuat pemerintah belum mampu menyelesaikan persoalan TKI di luar negeri. Terutama Arab Saudi. Banyaknya permasalahan TKI yang belum diselesaikan tersebut memunculkan *image* bahwa pemerintah kurang peduli.²⁶

Pemerintah Indonesia yang terkesan lamban bukan berarti tidak peduli melainkan karena tidak memiliki kemampuan yang cukup sesuai dengan kebutuhan TKI. Persoalan TKI di luar negeri umumnya lebih banyak mendapat perhatian khusus dari lembaga swadaya masyarakat dan lembaga bantuan hukum. Lembaga-lembaga tersebut aktif memberikan masukan-masukan berupa saran dan kritik kepada pemerintah untuk meningkatkan perlindungan TKI.

Simpulan

Permasalahan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) merupakan permasalahan yang belum bisa terselesaikan dengan baik. Birokrasi mempunyai peranan yang sangat signifikan dalam memberikan perlindungan pada TKI. Birokrat dalam birokrasi merupakan wakil perpanjangan pemerintah dalam memberikan pelayanan pada TKI. Peningkatan Peran yang sedang dilakukan oleh BNP2TKI merupakan implementasi dari kebijakan pemerintah dalam mengatasi permasalahan TKI di luar negeri. Ketika peran pelayanan yang diberikan oleh birokrasi berjalan dengan baik dan maksimal maka TKI akan terlindungi. Pelayan mulai dari prapemberangkatan kelengkapan administrasi yang dibutuhkan TKI. Pembekalan yang dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan daya saing TKI di tempat kerja, perlindungan hukum ditempat TKI berkerja. Peran birokrat juga dilakukan melalui upaya diplomasi birokrasi dalam melakukan

²⁶ <http://www.republika.co.id/lutfi> achmad “*aplikasi kepedulian dalam bentuk kongkret*” diakses tgl 18 April 2010 pukul 16.05 wib

kerjasama dengan Negara tempat TKI berkerja. Kerjasama yang dilakukan dalam memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap TKI.

Daftar Pustaka

- Bandiono, Suko. Fajri Alihar, *Tinjauan Penelitian Migrasi Internasional di Indonesia, dalam Globalisasi dan Migrasi antar Negara*, Bandung, Alumni 1999
- Bachrawi, Sanusi, 2004“ *Pengantar Ekonomi Pembangunan*” Penerbit Rineka Cipta
- Budiman, Iskandar, *Dilema Buruh Di Rantau (Membongkar sistem kerja TKI di Malaysia)*, Ar-Ruzz, Yogyakarta, 2004
- Hadi Sasmito, 2004. “ *Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Arab Saudi: Kendala dan Prospek*.penerbit PT Gramedia Pustaka Utama
- M.Sadli,“*Masalah Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia*”, dalam <http://www.kolom/pasific.net.id/modules.php>
- Nainggolan, A. Edison, *Buku Saku Tenaga Kerja Indonesia*, Jakarta: Penerbit Tabloid Tenaga Kerja Indonesia, 2007
- Nasution, M. Arif, *Globalisasi dan Migrasi antar Bangsa*, yayasan Adikarya IKAPI dan The Ford Foundation, Bandung, 1999
- Syafri Harto, 2003, “*Masalah Tki Illegal, (Studi Tentang Riau Sebagai Daerah Transit Bagi TKI Illegal)*” Jurnal Ilmu Hubungan Internasional hal 177
- Suko Bandiyono dan Fadjri Alihar “ *A review of Research Work on International Migration in Indonesia.*”, dalam <http://www.unesco.org/most/apmrlabo5.doc>.
- Duka di negeri Gurun, <http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/2010/11/29/NAS/mbm>. diakses 20 September 2011 pukul 10.00 WIB
- [http://www.vhrmedia.com/vhr-corner/komunitas,-permasalahan tenaga kerja Indonesia-269.html](http://www.vhrmedia.com/vhr-corner/komunitas,-permasalahan%20tenaga%20kerja%20Indonesia-269.html). *Artikel Permasalahan yang Dihadapi TKI*. Diakses tgl 20 Februari 2010 pukul 20.31 wib
- <http://www.bnp2tki.go.id>. *Artikel Kekerasan yang Dialami para TKI*. Diakses tgl 20 Februari 2010 pukul 21.00 wib
- <http://www.migrancare.com>. *Artikel Arab Saudi Akui Adanya Pelanggaran Hak TKI* . Diakses tgl 14 Februari 2010 pukul 21.20 wib

<http://www.mail-achive.com/mediacare@yahoogroups.com/msg32222.html>. Diakses tgl 21
Februari 2010 pukul 21.50 wib

<http://www.cidesonline.org/content/view/161/65/lang.id>. *Artikel Perlindungan BNP2TKI
terhadap TKI*. Diakses tgl 16 Februari 2010 pukul 01.02 wib